

Analisis Efektivitas, Efisiensi Serta Kemandirian dan Pertumbuhan Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar

Syahrudin¹, Saida Said², Nurul Fuada³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
Email: 9csyahrull@gmail.com, Saida.said1072@gmail.com, nurulfuada@unismuh.ac.id,

ABSTRAK

Pemerintahan daerah bertujuan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi warga, serta memperkuat daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan karakteristik masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan keuangan daerah menjadi aspek penting penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar periode 2018–2023. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rasio efektivitas keuangan rata-rata sebesar 91% dengan kategori efektif; (2) rasio efisiensi keuangan rata-rata 99% dengan kategori kurang efisien; (3) rasio kemandirian keuangan rata-rata 60% dengan kategori sedang; dan (4) rasio pertumbuhan keuangan rata-rata 4% dengan pertumbuhan positif. Temuan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Makassar cukup mampu mengelola keuangan daerah secara mandiri, namun perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Kata kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

Regional government aims to accelerate the achievement of community welfare through improving services, empowerment, and citizen participation, as well as strengthening regional competitiveness while still paying attention to the principles of democracy, justice, equality, and the characteristics of each region within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this context, effectiveness, efficiency, independence, and growth of regional finances are important aspects of governance. This study aims to analyze the level of effectiveness, efficiency, independence, and growth of the financial performance of the Makassar City Regional Government for the 2018–2023 period. The research approach used is quantitative with a descriptive analysis method. The results of the study show that: (1) the average financial effectiveness ratio is 91% with an effective category; (2) the average financial efficiency ratio is 99% with a less efficient category; (3) the average financial independence ratio is 60% with a moderate category; and (4) the average financial growth ratio is 4% with positive growth. These findings reflect that the Makassar City Government is quite capable of managing regional finances independently, but needs to improve efficiency in budget management.

Keywords: Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Growth Ratio, Financial Performance.

Pendahuluan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, terdapat beberapa masalah yang sering muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara penganggaran APBD dan substansi program, serta banyaknya realisasi belanja APBD yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, sering terjadi kelebihan pembayaran honorarium.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengelola anggaran daerah dan menilai keberhasilan pembangunan adalah dengan menerapkan rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian, dan pertumbuhan pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup kewenangan dalam pengelolaan keuangan, prinsip-prinsip umum, serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menilai apakah suatu daerah mengelola keuangan dengan baik, dapat dilakukan analisis menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas [1]. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan, karena kemampuan finansial ini merupakan salah satu indikator penting untuk

mengukur tingkat otonomi suatu daerah, Faktor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena tanpa biaya yang cukup, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Keuangan menjadi salah satu kriteria utama untuk menilai kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola urusan internalnya.

Menurut [2] Kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan program setiap institusi atau unit kegiatan adalah ketersediaan anggaran yang kemudian disalurkan pada setiap sisi program yang disediakan atau program yang direncanakan dengan melalui pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, mulai penganggaran, dari perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, penatausahaan/akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah guna mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat [3]

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menggunakan teori agensi sebagai rujukan Teori keagenan (*agency theory*) ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Pihak manajemen adalah tenaga profesional (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan manajemen perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin[4]. Sesuai dengan Buchanan (1975) dalam [5] berpendapat bahwa negara diwakili oleh politisi yang terpilih secara demokratis bertindak sebagai agen dan tuntutan warga bertindak sebagai prinsipal. Politisi dan birokrat mengambil keputusan bersama dan menetapkan kebijakan publik atas nama warga negara.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut[6]. Menurut[7] Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut [8] Pengelolaan keuangan daerah yaitu berupa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah dalam praktiknya pengelolaan keuangan daerah menggunakan prinsip Akuntabilitas, kejujuran (*probility*), transparansi, pengendalian dan *value for money*. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan konsep *Value for Money* yang mencakup aspek ekonomis, efisien, dan efektif sangat penting untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [9] juga pernah meneliti tentang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Manokwari tahun 2015-2019 dengan menanalisis tingkat efisiensi dan efektivitas, peneliti menemukan bahwa hasil perhitungan rata-rata tingkat rasio efisiensi menunjukkan Angka 92,50% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari tergolong kurang efisien. Namun, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari dari tahun 2015 hingga 2019 cenderung stabil, dengan tingkat efektivitas yang dapat dikategorikan cukup efektif. dengan rata-rata 89,32%.

Penelitian ini mengeksplorasi dengan menambahkan beberapa variable lain yaitu, selain mencari tingkat efektivitas dan efisiensi untuk menghitung kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kota Makassar, penelitian ini juga akan menganalisis tingkat kemandirian dan Tingkat pertumbuhan pendapatan keuangan daerah periode 2018-2023. Hal ini relevan untuk memahami bagaimana Tingkat efektivitas, efisiensi serta Tingkat kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerah kota makassar periode terbaru, sehingga memberikan wawasan baru tentang pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Metode Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Makassar untuk kepentingan pengumpulan data pada Badan Pengellaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD). Adapun populasi yang digunakan yaitu laporan realisasi anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan (CALK) pemerintah Kota Makassar selama 6 tahun terakhir 2018-2023.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa bilangan, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berbentuk kajian Pustaka, berkas-berkas, dan catatan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif deskriptif menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan keuangan daerah dan diolah dengan Microsoft Excel untuk memberikan Gambaran mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Makassar secara menyeluruh dan.

Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif [9]. Efektivitas diukur dengan membandingkan *output* yang dihasilkan dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan [10]. Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut dianggap efektif.

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output* [11]. Efektivitas lebih menekankan pada pencapaian hasil (*outcome*). Oleh karena itu, efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \quad (1)$$

Rasio Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diartikan sebagai daya guna. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya menekankan pada hasil yang dicapai, tetapi juga pada usaha atau pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, sehingga dapat menghindari pemborosan.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*) [12]. Sedangkan menurut [13] Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, menurut Mardiasmo dalam [14]. Dengan demikian, efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \quad (2)$$

Rasio Kemandirian

Daerah yang mandiri berarti daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dapat diperoleh maka akan semakin mandiri [15]. Menurut [16] berpendapat bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang diukur dari tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada besaran PAD yang suatu daerah, serta proses pemda mengalokasikan sumber dana tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam mensejahterakan Masyarakat.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim 2011 :168) dalam [18] Mengemukakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, hal yang paling penting adalah mengenai pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- Pola Hubungan Instruktif, dalam pola ini, peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah, Dimana daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
- Pola Hubungan Konsultatif, pada pola ini campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, dan lebih banyak memberikan konsultasi, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.
- Pola Hubungan Partisipatif, ini adalah pola dimana peran pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan telah mendekati kemampuan untuk melaksanakan urusan otonomi. Peran konsultasi pemerintah pusat beralih menjadi partisipasi.
- Pola Hubungan Delegatif, dalam pola ini campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap untuk mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah dengan keyakinan penuh.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\% \quad (3)$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data eksternal). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio Pertumbuhan

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dalam menentukan pertumbuhan pemerintah daerah apakah mengalami pertumbuhan positif atau negatif selama periode tahun anggaran[17]. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t - 1)}{\text{PAD tahun } (t - 1)} \times 100\% \quad (4)$$

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan di bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Menurut [10], Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan *outputnya (cost of outcome)*.

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- Hasil perbandingan antara 90% - 100% berarti efektif
- Hasil perbandingan 80% - 90% berarti cukup efektif
- Hasil perbandingan 60% - 80% berarti kurang efektif
- Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

Tabel 1. Perhitungan rasio efektivitas pemerintah daerah kota makassar

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2018	3.892.235.958.000,00	3.428.479.729.162,65	88%	Cukup efektif
2019	4.055.576.463.716,00	3.666.359.990.154,91	90%	Cukup efektif
2020	3.469.163.140.080,00	3.323.662.286.602,28	96%	Efektif
2021	3.577.236.761.303,82	3.286.048.497.393,93	92%	Efektif
2022	3.986.429.637.856,00	3.587.333.930.242,50	90%	Cukup efektif
2023	4.517.197.053.787,00	4.049.377.501.946,78	90%	Cukup efektif
Rata-rata			91%	Efektif

Adapun perhitungan untuk mengetahui rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{3.428.479.729.162,65}{3.892.235.958.000,00} \times 100\% = 88\% & 2021 &= \frac{3.286.048.497.393,93}{3.577.236.761.303,82} \times 100\% = 92\% \\
 2019 &= \frac{3.666.359.990.154,91}{4.055.576.463.716,00} \times 100\% = 90\% & 2022 &= \frac{3.587.333.930.242,50}{3.986.429.637.856,00} \times 100\% = 90\% \\
 2020 &= \frac{3.323.662.286.602,28}{3.469.163.140.080,00} \times 100\% = 96\% & 2023 &= \frac{4.049.377.501.946,78}{4.517.197.053.787,00} \times 100\% = 90\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan kinerja mengguranakan tingkat efektivitas menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Makassar sebesar 91% dengan kriteria efektif pada tahun

2018-2023. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian atau tujuan dengan kebijakan (hasil guna) menurut Mardiasmo (2009:132) dalam [18]

Hal ini menunjukkan bahwa hasil program dengan target yang telah ditetapkan tercapai. Ini dapat terlihat dari terlaksananya program yang ditargetkan pemerintah yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga dan pemuda, peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pariwisata.



Gambar 1. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah kota makassar

Berdasarkan grafik diatas pemerintah belum mampu mempertahankan Tingkat efektivitas yang konsisten, tahun 2020 merupakan Tingkat efektivitas tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun yaitu sebesar 96 % berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah kota hal tersebut terjadi karena besarnya dana pendapatan transfer yang diterima pemerintah kota yaitu sebesar Rp. 2.053.495.450.613,13 dengan penyumbang terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.676.121.523.287,00 dan tahun setelahnya mengalami penurunan karena Indonesia adanya pembatasan social yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan Covid-19.

Pada tahun 2018 merupakan Tingkat efektivitas terendah dalam kurun 6 tahun yaitu dengan presentase sebesar 88% berdasarkan laporan realisasi anggaran hal tersebut terjadi karena retribusi daerah yang terealisasi masih jauh dari yang sudah dianggarkan dengan presentase realisasi sebesar 42%.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Makassar didasarkan tingkat efektivitas yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menunjukan bahwa realisasi program selama tahun 2018-2023 berada pada kriteria efektif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [19] pada tahun 2022 dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sikka periode tahun 2016-2023 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Sikka telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Sikka. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sikka selama periode 2016-2020 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan). Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh [22] dengan judul penelitian analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah pemerintah kota bitung tahun anggaran 2014-2018, peneliti menemukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota bitung untuk tingkat efektivitas pada Pemerintah Kota Bitung selama periode tahun anggaran 2014-2018 terbagi atas dua kriteria yaitu efektif untuk tahun 2014 dan 2017 sedangkan cukup efektif pada tahun 2015, 2016, dan 2018.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efisien pendapatan yang diperoleh untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Rasio efisiensi membandingkan *Input* yang di dapat pemerintah daerah terhadap *Output* yang dikeluarkan.

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, yaitu:

- Hasil lebih dari 100%, maka dikatakan tidak efisien.
- Hasil antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
- Hasil antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
- Hasil antara 60% - 80%, maka dikatakan efisien.
- Hasil dibawah 60%, maka dikatakan sangat efisien.

Tabel 2. Perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah kota makassar

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2018	3.526.081.002.897,09	3.428.479.729.162,65	103%	Tidak Efisien
2019	3.548.006.636.748,30	3.666.359.990.154,91	97%	Kurang Efisien
2020	2.968.616.107.772,68	3.323.662.286.602,28	89%	Cukup Efisien
2021	3.150.496.728.994,07	3.286.048.497.393,93	96%	Kurang Efisien
2022	3.549.062.984.209,34	3.587.333.930.242,50	99%	Kurang Efisien
2023	4.507.727.571.970,40	4.049.377.501.946,78	111%	Tidak Efisien
Rata-rata			99%	Kurang Efisien

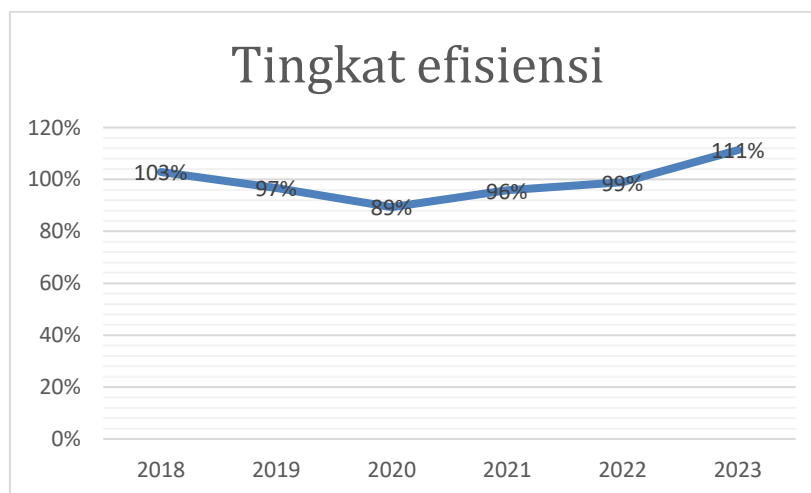
Adapun perhitungan untuk mengetahui rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{3.526.081.002.897,09}{3.428.479.729.162,65} \times 100\% = 103\% & 2021 &= \frac{3.150.496.728.994,07}{3.286.048.497.393,93} \times 100\% = 96\% \\
 2019 &= \frac{3.548.006.636.748,30}{3.666.359.990.154,91} \times 100\% = 97\% & 2022 &= \frac{3.549.062.984.209,34}{3.587.333.930.242,50} \times 100\% = 99\% \\
 2020 &= \frac{2.968.616.107.772,68}{3.323.662.286.602,28} \times 100\% = 89\% & 2023 &= \frac{4.507.727.571.970,40}{4.049.377.501.946,78} \times 100\% = 111\%
 \end{aligned}$$

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar masih jauh dari kata efisien, pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dari tidak efisien menuju cukup efisien dengan presentasi sebesar 89%, hal ini terjadi karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah pada tahun 2018, pada tahun 2019 pendapatan dan belanja daerah tidak terlalu jauh berbeda, pada tahun 2020 pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan efisiensi karena pendapatan dan belanja daerah tidak terlalu jauh berbeda, pada tahun 2023 realisasi belanja lebih besar dari pada pendapatan daerah. Oleh karena itu faktor penurunan efisiensi pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

- Belanja daerah yang meningkat.
- Belanja daerah tidak terlalu jauh dari pendapatan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar belum memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Besarnya realisasi anggaran belanja dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan asas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.



Gambar 2. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah kota makassar

Berdasarkan grafik diatas Tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami fluktuasi Dimana tahun 2020 merupakan kriteria cukup efisien yang artinya pemerintah pengeluaran pemerintah lebih kecil

dibandingkan dengan pendapatan pemerintah kota. Tahun 2023 merupakan Tingkat presentase tertinggi yaitu sebesar 111% dengan kriteria tidak efektif yang artinya pengeluaran atau belanja daerah pemerintah lebih besar dan melebihi pendapatan daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2023 belanja operasi merupakan pengeluaran terbesar.

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar pada tingkat efisien yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat efisiensi selama tahun 2018-2023 berada pada kriteria kurang efisien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [21] pada tahun 2022 dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2016-2020 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Sikka. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sikka selama periode 2016-2020 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan). Penelitian serupa dengan [22] menemukan bahwa Tingkat efisiensi kota bitung tahun 2014-2018 pada umumnya sudah masuk kriteria efisien hanya pada tahun 2015 dan 2018 tergolong tidak efisien, yang artinya pemerintah kota bitung mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dari pada pemerintah kota makassar.

Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, untuk menetapkan parameter penilaian, kriteria yang digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. 0% - 25% = Rendah sekali
- b. 25% - 50% = Rendah
- c. 50% - 75% = Sedang
- d. 75% - 100% = Tinggi

Tabel 3. Perhitungan rasio kemandirian pemerintah daerah kota makassar

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer Pusat	Dana Tranfrer Provinsi	Dana Pinjaman	Tingkat Kemandirian
2018	1.185.453.010.989,65	1.808.260.589.494,00	272.000.033.019,00	-	57%
2019	1.303.316.337.553,94	1.824.567.795.448,00	356.994.230.000,97	-	60%
2020	1.078.328.561.269,15	1.676.121.523.287,00	302.750.607.332,13	-	54%
2021	1.140.328.483.697,93	1.687.551.396.041,00	261.622.311.935,00	-	59%
2022	1.410.813.774.025,23	1.800.519.452.371,27	349.018.380.846,00	-	66%
2023	1.568.267.701.812,65	2.011.977.557.333,00	436.109.593.050,63	-	64%
Rata-rata					60%

Adapun perhitungan untuk mengetahui rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{1.185.453.010.989,65}{1.808.260.589.494,00 + 272.000.033.019,00 + 0} \times 100\% = 57\% \\
 2019 &= \frac{1.303.316.337.553,94}{1.824.567.795.448,00 + 356.994.230.000,97 + 0} \times 100\% = 60\% \\
 2020 &= \frac{1.078.328.561.269,15}{1.676.121.523.287,00 + 302.750.607.332,13 + 0} \times 100\% = 54\% \\
 2021 &= \frac{1.140.328.483.697,93}{1.687.551.396.041,00 + 261.622.311.935,00 + 0} \times 100\% = 59\% \\
 2022 &= \frac{1.410.813.774.025,23}{1.800.519.452.371,27 + 349.018.380.846,00 + 0} \times 100\% = 66\%
 \end{aligned}$$

$$2023 = \frac{1.568.267.701.812,65}{2.011.977.557.333,00 + 436.109.593.050,63 + 0} \times 100\% = 64\%$$

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, apabila dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2023, rata-rata rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Makassar yaitu 60% dengan kriteria sedang yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah Kota Makassar menggambarkan sejauh mana ketergantungan pemerintah Kota Makassar terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat kota Makassar dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Menurut Mahmudi (2016) dalam [23] rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [20] pada tahun 2023 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2021 menunjukkan bahwa nilai rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 67,66 persen, di mana hal tersebut termasuk dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Adapun pola hubungan partisipatif menunjukkan bahwa peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Pendapatan asli daerah pendapatan transfer, dikarenakan adanya peningkatan Pendapatan asli daerah komponen dana alokasi khusus non fisik, terutama Pendapatan asli daerah alokasi dana BOS satuan pendidikan provinsi dan pemberian tunjangan profesi guru PNSD (CALK Sumsel). Penelitian ini juga pernah dikukan oleh [25] dengan judul penelitian Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Kemandirian Kota Surabaya menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori sedang dengan rata-rata 58,68%, mencerminkan pola hubungan partisipatif dalam hal ketergantungan keuangan penelitian ini sejalan dan dengan kinerja keuangan pemerinrah kota makassar.

Analisis Rasio Pertumbuhan

Growth ratio (rasio pertumbuhan) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. Rasio ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan keuangan pemerintah dari tahun ke tahun. Jika rasio pertumbuhan menunjukkan angka positif (>0%), hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan pencapaiannya atau memiliki kinerja yang baik begitupun sebaliknya.

Tabel 4. Perhitungan rasio pertumbuhan pemerintah daerah kota makassar

Tahun	PAD Tahun t	PAD Tahun (t-1)	Tingkat Pertumbuhan
2018	1.185.453.010.989,65	-151.778.083.242,35	-11%
2019	1.303.316.337.553,94	117.863.326.564,2	10%
2020	1.078.328.561.269,15	-224.987.776.284,79	-17%
2021	1.140.328.483.697,93	61.999.922.428,78	6%
2022	1.410.813.774.025,23	270.485.290.327,30	24%
2023	1.568.267.701.812,65	157.453.927.787,42	11%
Rata-rata			4%

Adapun perhitungan untuk mengetahui rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$2018 = \frac{1.185.453.010.989,65 - (-151.778.083.242,35)}{(-151.778.083.242,35)} \times 100\% = -11\%$$

$$2019 = \frac{1.303.316.337.553,94 - 117.863.326.564,2}{117.863.326.564,2} \times 100\% = 10\%$$

$$\begin{aligned}
 2020 &= \frac{1.078.328.561.269,15 - (-224.987.776.284,79)}{(-224.987.776.284,79)} \times 100\% = -17\% \\
 2021 &= \frac{1.140.328.483.697,93 - 61.999.922.428,78}{61.999.922.428,78} \times 100\% = 6\% \\
 2022 &= \frac{1.410.813.774.025,23 - 270.485.290.327,30}{270.485.290.327,30} \times 100\% = 24\% \\
 2023 &= \frac{1.568.267.701.812,65 - 157.453.927.787,42}{157.453.927.787,42} \times 100\% = 11\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar menunjukkan rasio pertumbuhan presentase tingkat rasio pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2022 dengan rasio pertumbuhan sebesar 24%. Persentase tingkat rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah daerah Kota Makassar terlihat fluktuatif. Apabila dilihat dari tahun 2018-2023 rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio pertumbuhan yaitu 4% dengan kriteria pertumbuhan positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar dalam tahun anggaran 2018-2023, kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif. Artinya peningkatan pendapatan daerah Kota Makassar mengindikasikan lebih tinggi dari tingkat inflasi, sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan kinerja dan mencari cara lain untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Makassar tidak akan merosot.

Menurut Halim (2012) dalam [26] analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan (Trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [21] dengan judul Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019, dengan penemuan bahwa Rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 2,82% Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pengelolaan belanja daerah.

Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Cilegon cukup baik, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan capaian. Pada tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, yang berdampak pada turunnya pendapatan dibanding tahun 2017. Namun tahun 2019 Pemerintah Kota Cilegon Kembali berupaya meningkatkan capaian kinerja pengelolaan belanja daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah dan belanja daerah (baik belanja operasi maupun belanja modal).

Keberhasilan Pemerintah Kota Cilegon dalam pengelolaan keuangan masih dipengaruhi oleh kebijakan eksternal, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat ketika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi/Pusat, akan berdampak pada kinerja pemerintah Kota Cilegon.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh [28] dengan judul penelitian analisis tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan pemerintah kota Bandung provinsi jawa barat menemukan bahwa pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung menunjukan sejak 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Bandung hanya dua kali mengalami pertumbuhan keuangan yang negatif, yaitu pada 2017 serta pada tahun 2020 yang terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19. Penelitian tersebut sejalan dengan kinerja pemerintah kota Makassar yang mengalami dua kali pertumbuhan negative pada tahun 2018 dan tahun 2020.

Simpulan

Hasil analisis periode tahun 2018-2023, rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar sebesar 91% dengan kriteria efektif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program, atau kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Makassar sudah dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Hasil analisis periode tahun 2018-2023, rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah Kota Makassar sebesar 99% dengan kriteria kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan anggaran belanja belum memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal. Hasil analisis periode tahun 2018-2023, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar sebesar 60% dengan kriteria sedang yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar sudah mulai mengurangi ketergantungan dari pihak eksternal dimana peran pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian daerah telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi. Hasil analisis periode tahun 2018-2023, rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio pertumbuhan PAD yaitu 4% dengan kriteria pertumbuhan positif. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar dalam tahun periode anggaran 2018-2023 menunjukkan kinerja keuangan dengan mengalami pertumbuhan yang positif.

Saran yang penulis dapat berikan yaitu Mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program pemerintah dengan melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara sistematis agar program yang berjalan tetap sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan memberikan hasil yang maksimal. Meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan anggaran pada sektor-sektor yang kurang produktif. Memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan mengembangkan strategi peningkatan PAD dengan optimalisasi pajak dan retribusi dan mendorong investasi lokal dan pengembangan sektor ekonomi produktif. Mendorong pertumbuhan keuangan yang lebih agresif dengan mengembangkan sektor unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk memdongkrak pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah daerah Kota Makassar, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah pemerintah kota serta pembentukan badan khusus yang berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara sistematis. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan menggunakan atau menambahkan lebih banyak rasio seperti rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio belanja modal sehingga hasil penelitian ini lebih akurat, serta menggunakan metode seperti Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dapat diterapkan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- [1] A. Zarkasyi Rahman and F. Lintang Saputra, "Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap," vol. 22, no. 2, pp. 117–126, 2022, doi: 10.21831/hum.v22i2.
- [2] L. Pappa, F. Menne, and S. Suriani, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar," *Indonesian Journal of Business and Management*, vol. 6, no. 1, 2023, doi: 10.35965/jbm.v6i1.3870.
- [3] Y. Arfah, "Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Sei Tuan," *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, vol. 1, no. 1, pp. 38–44, Feb. 2022, doi: 10.54209/jasmien.v1i1.130.
- [4] B. Lesmono and S. Siregar, "Studi Literatur Tentang Agency Theory," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, vol. 3, no. 2, 2021, doi: 10.47065/ekuitas.v3i2.1128.
- [5] Y. Y. Sonbay, "Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti," *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, vol. 6, no. 2, 2022, doi: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176.
- [6] C. J. Tamon, E. N. Walewangko, and ..., "Analisis Pola Pengeluaran Rutin Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara," ... *dan Keuangan Daerah*, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/41292>
- [7] S. Putri Kasmiyanti, "YUME : Journal of Management Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar," 2019.
- [8] J. Ricardo Parera and A. Tanudy, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Di Kota Jayapura," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, 2023, doi: 10.55049/jeb.v15i1.229.
- [9] J. P. Koromath, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari," *Lensa Ekonomi*, vol. 11, no. 01, p. 13, 2020, doi: 10.30862/lensa.v11i01.75.
- [10] Mikael. Edowai, Herminawaty. Abubakar, and Miah. Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. gowa: Pusaka Almaida, 2021.
- [11] Jamaluddin. Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, vol. 11, no. 1. gowa: Pusaka Almaida, 2019. [Online]. Available: http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- [12] E. Fredrik Tuju, H. Manossoh, and H. R. N Wokas, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Budaya, dan Hukum)*, vol. 6, no. 1, pp. 185–196, 2022.
- [13] F. Manimbaga, J. J. Sondakh, and S. Pinatik, "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018," *jurnal EMBA*, vol. 9, pp. 982–992, 2021.
- [14] D. Pratiwi Ar, S. Adrianti Anwar, M. Muchsiddin, H. Sasmita, and I. Bisnis Dan Keuangan Nitro, "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Makassar," 2023. [Online]. Available: <http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/KH>

- [15] Y. S. Saknosiwi, J. B. Kalangi, and K. D. Tolosang, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 21, no. 03, pp. 37–45, 2021.
- [16] N. Andriana, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.31092/jpkn.v1i2.793.
- [17] M. Khoirunnisa and Eleonora Sofilda, "Determinasi Kemandirian Daerah Di Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Trisakti*, vol. 3, no. 2, 2023, doi: 10.25105/jet.v3i2.18177.
- [18] A. Bakar and S. W. Said, "Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika," *Jurnal Kritis*, vol. 5, 2021.
- [19] E. Elis and A. Munandar, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021," *Akuntoteknologi*, vol. 15, no. 1, 2023, doi: 10.31253/aktek.v15i1.2115.
- [20] S. S. Lona, M. E. Perseveranda, and H. A. Manafe, "Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja," *Owner*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i1.1486.
- [21] Magdalena Y. Devinci, Yosefina Andia Dekrita, and Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka," *Jurnal Projemen UNIPA*, vol. 9, no. 2, 2023, doi: 10.59603/projemen.v9i2.44.
- [22] F. Manimbaga, J. J. Sondakh, and S. Pinatik, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Hitung Tahun Anggaran 2014-2018," *Jurnal EMBA*, vol. 9, no. 2, 2021.
- [23] Irnawati, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Makasar," *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, vol. 4, pp. 403–416, 2023, [Online]. Available: http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/113738
- [24] V. R. Wellyan, E. Novaria, And L. Lisdiana, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, vol. 3, no. 3, 2023, doi: 10.51878/knowledge.v3i3.2456.
- [25] R. A. Putri and B. D. Waryanto, "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya," *Journal of Sustainability Business Research*, vol. 2, no. 3, 2021.
- [26] M. Zainul Muzaki M and M. Tunjung Hapsari, "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 – 2021," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v2i1.548.
- [27] V. Nuzullestary and E. Mulyaningsih, "Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019," *Tirtayasa Ekonomika*, vol. 16, no. 1, 2021, doi: 10.35448/jte.v16i1.10175.
- [28] R. M. R. P. K. Runjung, A. Primastuti, and Riswati, "Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat," *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, vol. 9, no. 2, 2022.